

## ABSTRAK

Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan PPAT dapat menolak untuk membuat akta, untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan izin ini hanya berlaku untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik tertentu yaitu tanah yang diperuntukan untuk pertanian.. Izin ini diperlukan untuk Proses Balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik yang memiliki Klausula Pada Penunjuk Sertifikat yang menyatakan bahwa “Setiap Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah dan atau setiap Bentuk Perbuatan Hukum yang bermaksud untuk memindahkan hak milik atas tanah ini, baik seluruhnya maupun sebagian diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa diperlukan Izin Pengalihan Pendaftaran Tanah Dari Kepala Kantor Pertanahan Untuk Proses Balik Nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar? Apa kaitannya Izin Pengalihan Pendaftaran Tanah Dari Kepala Kantor Pertanahan Untuk Proses Balik Nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar? Bagaimanakah Proses pengurusan Izin Pengalihan Pendaftaran Tanah Dari Kepala Kantor Pertanahan Untuk Proses Balik Nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar? Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Izin Pengalihan Dalam Pendaftaran Tanah Dari Kepala Kantor Pertanahan sangat diperlukan Untuk Proses Balik Nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Izin Pengalihan Hak Atas Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan. diurus sebelum dilakukan pemberian nomor dan tanggal pada Akta Jual Beli yang berlaku untuk Sertifikat Hak Milik bagi tanah pertanian. Izin Pengalihan Hak Atas Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan merupakan salah satu syarat dalam proses peralihan hak menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan dan pasal 98 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci :, Akta Jual Beli, Izin, Peralihan Hak, PPAT

## ABSTRACT

According to Article 39 paragraph (1) letter e PP No. 24 of 1997 that PPAT may refuse to make the deed, for a legal act to be performed has not obtained official permission or the authority having jurisdiction, if such permission is required under the legislation in force. The permit requirements apply only to the process of transferring specific name Property Rights Certificate that land allocated for agriculture .. This permission is required for transfer-terhadap Process Certificate Proprietary having clause On Indicator certificate which states that "Every Appropriation Changes Land Use and or any Form of deeds Law which intends to transfer the land ownership, in whole or in part is required prior permission of the Head of Kampar District Land Office. The problem of this research is why necessary permissions In the Transfer of Land Registry Head Office Of Land For Feedback Process Name In Kampar District Land Office? What relation License Transfer of In the Land Registry Head Office Of Land For Feedback Process Name In Kampar District Land Office? How process of obtaining a permit Transfer of In the Land Registry Head Office Of Land For Feedback Process Name In Kampar District Land Office? This law research approach This study used the approach with juridical methods sociological (empirical), a study that used the method of approach to the problem by looking at the legal norms applicable then connected with legal facts contained in the field In this study the data source obtained from the research literature and field research. Data collected through the study of documents and structured interviews

Based on the results of the study, that the License Transfer of In the Land Registry Land Office Of Chief indispensable for Process Behind the Names In Kampar District Land Office. Permits Transfer of Rights to Land of the Head of the Land Office. administered prior to administration of the number and the date on the Sale and Purchase Agreements that apply for the Certificate Properties for farmland. Permits Transfer of Rights to Land of the Head of the Land Office is one of the requirements in the process of transfer of rights according to the Regulation of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2010 About the Service Standards and settings of Land and article 98 Regulation of the State Minister of Agrarian / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on the Implementation provisions of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration.

Keywords:, Sale and Purchase Agreements, Permits, Transfer of Rights, PPAT